

) III

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA**

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS                                      DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input checked="" type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	
JAN    FEB <u>MAR</u> APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 15 <span style="float: right;">TAHUN 2008</span>	

## Pengembangan Biofuel Diarahkan ke Sektor Hulu

JAKARTA — Para investor yang berminat untuk mengembangkan bahan bakar nabati (biofuel) di Indonesia diminta untuk menanamkan modalnya di sektor hulu biofuel. Ini sejalan dengan kebijakan pengembangan biofuel nasional yang terlebih dahulu akan difokuskan pada sektor hulu.

Ketua Tim Nasional Pengembangan Biofuel Alhilal Hamdi mengatakan, dengan naiknya harga komoditas pangan, maka sumber bahan baku pembuatan biofuel yang paling murah untuk menggan-

tikan bahan bakar fosil (BBM, red) adalah singkong. Karena itu, menurut dia, yang paling memungkinkan untuk dikembangkan adalah bioethanol yang berbahan baku singkong.

"Dengan mengembangkan biodiesel dari kelapa sawit harga jual ke konsumen akan lebih tinggi dibandingkan harga BBM. Kan tidak mungkin kita juga mensubsidi biofuel ini," ujarnya di Jakarta, Ahad (30/3).

Alhilal mengatakan, pengembangan bioethanol ini masih menghadapi

kendala ketersediaan bahan baku. Karena itu, Al Hilal mengatakan perlu dilakukan upaya mendorong investor yang akan masuk itu untuk berinvestasi terutama di hulu.

Dengan berkembangnya sektor hulu biofuel, Al Hilal optimistis sektor hilir industri pengolahan biofuel juga akan berkembang. Jika hal itu tercapai, menurut dia, dengan sendirinya investor akan masuk di industri pengolahan biofuel.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Cakrawan mengatakan, kalangan

investor masih menunggu kepastian dari pemerintah. Menurutnya, sebanyak 70 investor biofuel yang telah mendaftarkan rencana investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga kini belum merealisasikan investasi mereka.

Sebagian besar para investor tersebut berasal dari dalam negeri, dan beberapa lainnya investor asing. Paulus mengatakan, para investor itu menilai kebijakan pengembangan biofuel di Indonesia belum memiliki kepastian, terutama soal ketersediaan pasar biofuel. ■ dia

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: T.8

TAHUN 2008

## 'Penggunaan BBN belumancam ketahanan pangan'

Oleh RUDI ARIFFIANTO  
*Bisnis Indonesia*

JAKARTA: Penggunaan komoditas pangan sebagai bahan baku bahan bakar nabati (BBN/*biofuel*) di Indonesia masih rendah sehingga pengembangan *biofuel* belum menjadi ancaman bagi ketahanan pangan nasional.

Ketua Umum Asosiasi Produsen *Biofuels* Indonesia (Aprobi) Paulus Cakrawan mengatakan saat ini tidak terjadi perebutan komoditas bahan pangan untuk kebutuhan konsumsi dan produksi energi alternatif. Bahkan, dia memastikan dengan pengembangan secara terpadu, peran ganda komoditas pangan sebagai bahan baku *biofuel* dan konsumsi bisa diterapkan dan menguntungkan.

"Saya menjamin tidak akan terjadi perebutan antara BBN dan pangan untuk konsumsi. Bahkan BBN akan mendorong perbaikan harga pangan yang dinikmati petani," tutur Paulus akhir pekan lalu.

Dia mengakui ada isu yang dihembuskan berbagai pihak yang memojokkan pengembangan *biofuel*, di mana disebutkan bahan bakar alternatif tersebut akan mengganggu pasokan untuk kebutuhan konsumsi pangan manusia.

Kalangan yang mengusung isu itu, katanya, mencontohkan praktik pengembangan *bioethanol* yang berbahan jagung di Meksiko dan berbagai negara lainnya, yang mendorong harganya.

"*Biofuel* dijadikan kambing hitam dari tren kenaikan harga itu. Padahal dalam konteks Indonesia, penggunaan *biofuel* berbasis bahan pangan masih terhitung sangat rendah," tuturnya.

Bioetanol berbahan singkong yang dipakai di dalam negeri masih sebanyak 1.000 kiloliter per tahun atau 0,07% dari stok singkong. Biodiesel berbasis sawit yang dipasarkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) hanya 16.000 kiloliter per tahun, atau 0,078% dari sawit.

"Padahal sawit yang digunakan untuk minyak makan sekitar empat juta ton atau 23% dari stok sawit yang kita miliki," tuturnya.

### Tersendat

Aprobi justru mengeluhkan tersendatnya pengembangan *biofuel* di dalam negeri sebagai buntut kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan energi alternatif pengganti fosil tersebut. Padahal, katanya, *biofuel* berpotensi menjadi pendukung utama bagi ketahanan energi masa depan nasional.

Bila pemerintah secara tegas mengikuti peta jalan atau cetak biru yang digariskannya sendiri, yaitu 5% terhadap pemakaian BBM dalam negeri, *bioethanol* seharusnya dikonsumsi sebanyak 800.000 kiloliter per tahun dan biodiesel sebanyak 1.290.000 ton per tahun.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 **31**

HALAMAN : 11

TAHUN 2008

# Ada apa dengan biofuel?

Oleh WAYAN R. SUSILA

Peneliti pada Lembaga Riset Perkebunan Indonesia dan Konsultan pada ITAP-USAID

**Setelah ingar-bingar pada 2005 sampai dengan pertengahan 2007, isu biofuel tiba-tiba sunyi senyap bak ditelan bumi. Seminar dan diskusi biofuel yang sebelumnya sangat marak, kini nyaris tak terdengar.**

**P**emerintah tidak lagi gencar mempromosikan pengembangan biofuel. Pihak swasta yang sudah telanjur terjun di bisnis biofuel mulai mengerem atau bahkan menghentikan sementara proyek biofuelnya. Pihak swasta yang baru punya rencana, langsung menundanya.

Semula, isu pengembangan biofuel demikian seksi dari berbagai sudut pandang. Biofuel merupakan sumber energi yang terbarukan, merupakan bentuk diversifikasi produk dan stabilisasi harga produk pertanian, ramah lingkungan, merupakan bagian dari strategi ketahanan energi, bahkan dikaitkan dengan upaya mengurangi kemiskinan.

Pandangan yang demikian optimistis tersebut kini nyaris tak terdengar ketika harga bahan bakunya, khususnya CPO (*crude palm oil*), melambung pada tingkat harga yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.

Biodiesel berbahan baku jarak pagar sudah lebih dahulu hilang dari peredaran ketika hitung-hitungan ekonominya dan kendala teknisnya seperti bibit, produktivitas, mulai mengadang. Pertanyaannya sekarang adalah mau dibawa kemana industri biofuel kita?

Perlu jawaban yang tegas atas pertanyaan tersebut dan pilihannya hanya ada tiga yaitu mundur, maju terus, atau ditunda/diendapkan.

Terhadap pilihan ini, pilihan yang paling mudah untuk diabaikan adalah ditunda/diendapkan karena pilihan ini merupakan pertanda kita sebagai bangsa ragu-ragu, reaktif, atau suka ngekor. Jika kita mundur, ada beberapa kelebihan.

*Pertama*, kita tidak perlu bersusah

payah merancang berbagai kebijakan untuk pengembangan biofuel. Ini berarti ada sumber daya yang bisa dihemat, minimal pada jangka pendek.

*Kedua*, pemerintah dan pelaku bisnis energi hanya perlu lebih fokus pada sumber energi yang berbasis fosil

yang memang sudah sangat dikuasai.

Masalah yang sangat potensial atas pilihan mudur ini adalah, sanggupkah kita dalam jangka panjang menghadapi kenaikan harga energi yang berbasis fosil seperti BBM dan batu bara?

Banyak hasil studi lembaga internasional seperti Bank Dunia dan FAO memperkirakan terjadi kenaikan harga energi pada jangka panjang.

Mereka berkeyakinan bahwa harga energi akan berada pada keseimbangan baru yang lebih tinggi dari harga keseimbangan sebelumnya. Masalah yang lebih besar adalah bahwa energi berbasis fosil tersebut suatu saat akan habis. Untuk Indonesia, cadangan BBM diperkirakan hanya masih sekitar 15-17 tahun.

### Maju terus

Dengan pertimbangan tersebut, sebenarnya pilihan yang logis adalah maju terus. Tidak ada alasan pemerintah dan pihak swasta untuk menunda pengembangan biofuel.

Pada saat sekarang ketika harga bahan baku untuk biofuel sangat tinggi, memang tidak layak untuk mengembangkan biofuel secara komersial. Yang terpenting adalah jangan kendala yang bersifat sementara tersebut, membuat pengem-

bangun biofuel berhenti secara total.

BBM suatu saat akan habis dan harga BBM pasti akan tetap tinggi, walau mungkin tidak di atas US\$ 100 per barel. Argumen ini menjadi kunci kenapa Indonesia harus mengantisipasi dengan terus maju mengembangkan biofuel, di samping sebagai strategi diversifikasi energi dan ketahanan energi.

Pada saat sekarang, situasi pasar bahan baku untuk biofuel diyakini dalam proses menuju keseimbangan baru. Berbagai kajian menunjukkan harga-harga bahan baku untuk bio-

fuel pada saat ini dan mungkin satu semester ke depan, berada jauh di atas keseimbangan barunya.

Artinya, harga saat ini yang tinggi diyakini secara bertahap akan menurun.

Hal ini juga sangat sesuai dengan teori harga produk pertanian yang mengikuti pola atau siklus sejalan dengan teori Cobb-Web. Untuk harga produk pertanian, teori ini sudah tidak terbantahkan.

Sebagai contoh, CPO pernah menyentuh harga terendah sampai di bawah US\$ 200/ton, mencapai harga tertinggi di atas US\$ 1.280, dengan harga yang paling sering terjadi pada kisaran US\$ 375-450. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga produk pertanian, termasuk CPO, masih diyakini mengikuti siklus harga 4-6 tahunan.

Hukum ekonomi akan menggiring harga BBM berbasis fosil, harga biofuel, dan harga bahan baku biofuel akan terus bergerak menuju pada keseimbangan harga yang memberi keuntungan normal pada ketiga produk tersebut.

Selama masih ada harga produk

yang memberikan keuntungan berlebih (*supra profit*) akan selalu ada tekanan-tekanan seperti masuknya pemain baru, teknologi baru, penyesuaian dari konsumen, yang memaksa harga hanya memberi keuntungan normal.

Harga BBM berbasis fosil, biofuel, dan bahan bakunya akan terus bergerak sehingga tingkat *return* pada ketiga produk tersebut relatif sama.

Dengan demikian, bisnis biofuel pasti akan *feasible* pada masa mendatang. Yang kita perlukan sekarang adalah bersabar menunggu keseimbangan baru dengan tetap terus mempersiapkan diri untuk menyambut ketika kesempatan baik itu tiba.

Dengan perkataan lain, pemerintah harus tetap konsisten mendukung pengembangan biofuel dengan terus merumuskan

dan menerapkan berbagai

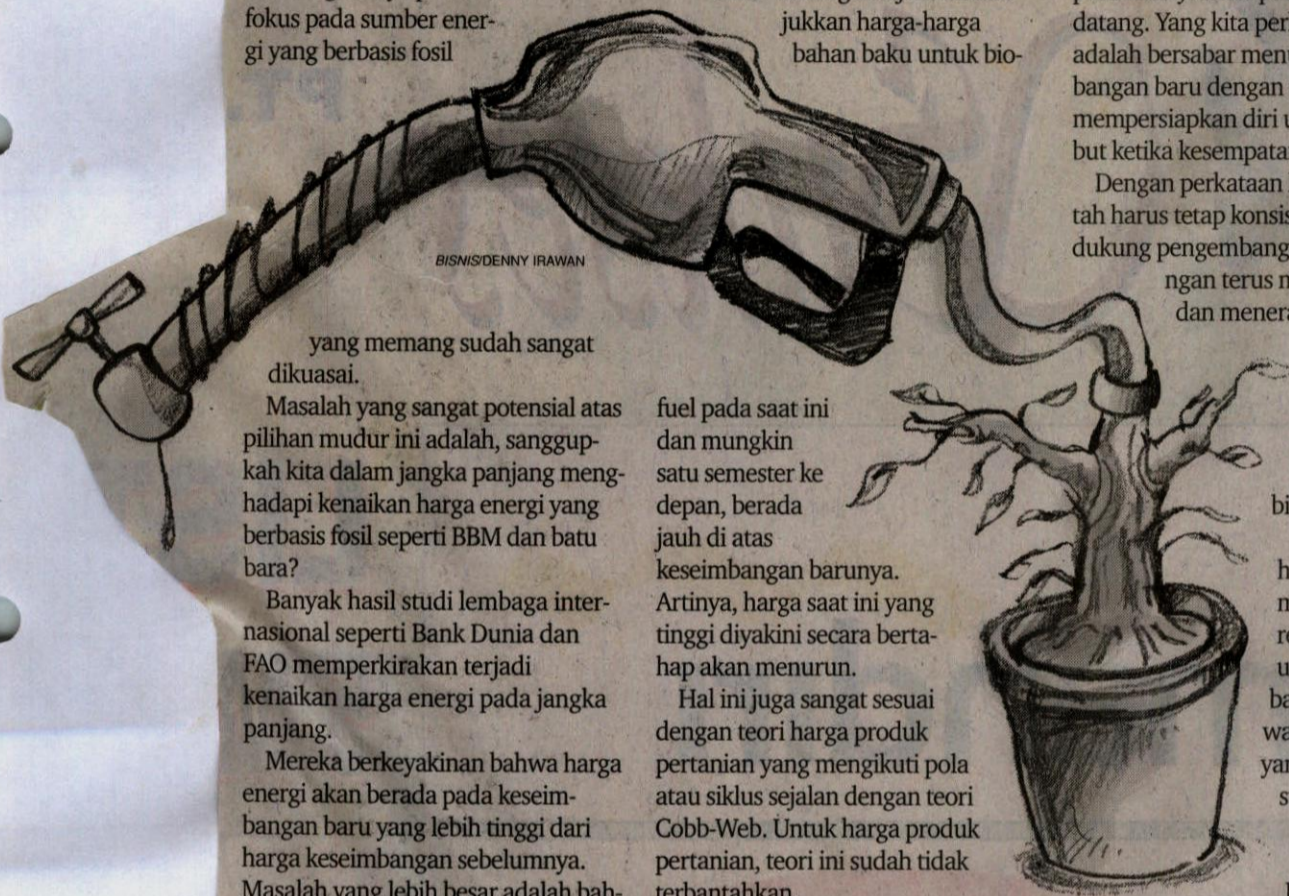
kebijakan subsidi, insentif, promotif untuk pengembangan biofuel.

Swasta juga harus meneruskan realisasi investasi untuk pengembangan biofuel walau dengan laju yang perlu disesuaikan dengan dinamika pasar BBM, biofuel, dan bahan bakunya.

Ketika kesempatan itu datang, industri biofuel Indonesia harus sudah siap dalam posisi *full sepped* untuk menjadi salah satu *market leader* di dunia; tidak tergaget-kaget untuk selanjutnya menjadi penonton karena ketidaksiapan kita.

Dengan posisi sebagai produsen terbesar CPO di dunia, menjadikan Indonesia sebagai pemimpin industri biofuel, khususnya biodiesel, sebenarnya bukanlah mimpi di siang bolong, melainkan sangat rasional. Kuncinya ada pada keyakinan dan tindakan yang proaktif untuk memanfaatkan kesempatan itu. *Let's do it!*

BISNIS/DENNY IRAWAN



HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

INDONESIA BERPOTENSI RAWAN PANGAN

'Selamatkan Daya

Beli Rakyat'

Oleh Zakiyah dan Nur Afni Fiazia

▶ JAKARTA – Kadin Indonesia merekomendasikan agar pemerintah menetapkan *grand policy* untuk merespons kondisi darurat pangan dunia dan dalam negeri. Untuk itu, pemerintah harus menyelamatkan daya beli masyarakat dari semua strata ekonomi.

Rekomendasi Kadin itu merupakan hasil dari *workshop* dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (29/3) dan Minggu (30/3). Kedua acara itu mengusung tiga tema yang terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, yakni masalah ketahanan pangan, ketersediaan energi, dan pembangunan infrastruktur. "Tema itu dikaitkan dengan kondisi ekonomi global saat ini," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat ketika dihubungi *Investor Daily*, Minggu (30/3) malam.

Semua masukan dari Kadin untuk mengatasi masalah ketahanan pangan akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Seluruh pakar dari organisasi pangan dunia, pelaku *trader* internasional, dan pengamat pangan dalam ne-

geri menyimpulkan negara manapun di dunia sudah tidak mungkin lagi bisa merancang strategi kebijakan pangan dengan cara menurunkan harga pangan.

Bahkan, Organisasi Pangan Dunia (FAO) memproyeksikan harga pangan dalam tiga tahun ke depan sudah tidak mungkin turun. "Dalam jangka panjang, sepuluh tahunan ke depan, harga pangan sangat mustahil bisa turun," jelas Adhi Siswaja Lukman, wakil ketua komite tetap ketahanan pangan dan industri pertanian Kadin Indonesia.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menambahkan, Kadin dan pemerintah harus bermitra dalam mengatasi masalah ketahanan pangan di Indonesia. Sebab, kenaikan harga pangan berdampak pada semua lapisan masyarakat, baik konsumen maupun kalangan industri. "Harus ada *action plan* yang konkret, je-



### Ketahanan Pangan Menjadi Prioritas Utama

Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat (kiri) didampingi Ketua *Steering Committee* Rapimnas Kadin Agusman Effendi dan Ketua Penyelenggara Rapimnas Kadin 2008 Sandiaga S Uno menyampaikan program dan agenda kegiatan Rapimnas, di antaranya membahas pertumbuhan ekonomi saat rapat internal di Jakarta, Minggu (30/3). MS Hidayat menyatakan, ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama dari beberapa prioritas yang harus diambil pemerintah.

### Proyeksi Produksi dan Stok Beras Dunia 2007/08 (Juta Metrik Ton)

Uraian	Pasokan		Penggunaan		Stok Akhir
	Produksi Sendiri	Impor	Domestik	Ekspor	
<b>Ekspor Utama</b>					
India	92,00	0,00	88,80	3,40	11,23
Pakistan	5,40	0,00	2,44	2,90	0,52
Thailand	18,50	0,01	9,60	9,00	2,49
Vietnam	23,25	0,45	18,72	5,00	1,39
Amerika	5,31	0,58	3,99	3,49	0,79
<b>Importir Utama</b>					
Brasil	7,99	0,85	8,90	0,15	0,35
Uni Eropa	1,57	1,10	2,75	0,15	0,99
Indonesia	34,00	1,50	36,15	0,00	2,31
Nigeria	3,00	1,70	4,70	0,00	0,60
Filipina	10,01	1,80	12,06	0,00	5,38
Timur Tengah	2,42	2,96	5,51	0,02	1,55
<b>Dunia</b>	<b>420,62</b>	<b>27,51</b>	<b>423,65</b>	<b>29,26</b>	<b>72,54</b>

Sumber: Departemen Pertanian AS (USDA)

### Langkah Penyelamatan Daya Beli

1. Meningkatkan investasi sektor riil, bukan investasi saham atau pasar modal.
2. Menciptakan lapangan kerja, terutama sektor lapangan kerja padat karya sesuai dengan tipologi atau karakteristik mayoritas tenaga kerja Indonesia.
3. Belanja pemerintah di bidang infrastruktur harus ditingkatkan dari saat ini hanya 2,7%.

las, dan detail dari pemerintah. Kadin harus mendorong untuk itu," kata dia. Pemecahan masalah keta-

hanan pangan dinilai tidak hanya terbatas pada swasembada beras karena faktanya kedelai, gula, dan ja-

gung masih banyak diimpor.

Selama ini, kebijakan pemerintah terkait pangan masih sebatas wacana tanpa terobosan signifikan. "Pengusaha mau-mau saja berinvestasi di sektor industri pangan. Tapi pemerintah harus punya target yang jelas dalam membuat program," kata Sofjan.

Para pakar telah mengingatkan sejumlah indikator kemiskinan akibat lonjakan harga pangan. Di semua negara produsen pangan, terjadi penurunan volume hasil panen 25% hingga 75% akibat meningkatnya populasi penduduk di negara miskin dan berkembang. Penurunan itu juga akibat ketidakpastian iklim, penurunan persentase pengeluaran rata-rata per kapita per bulan penduduk pada pos pengeluaran pangan, dan nilai tukar penghasilan penduduk makin rendah.

Dalam pandangan Kadin, pemerintah tidak bisa lagi menerapkan kebijakan pangan 'asal murah', tapi kenyataannya justru membuat penduduk Indonesia tidak mampu membelinya. "Daya beli inilah yang harus diselamatkan. Pemerintah agar lebih serius dalam membenahi ketahanan pangan, terutama empat aspek, yakni peningkatan produksi, pembenahan distribusi, stabilisasi harga, dan subsidi bagi masyarakat miskin," ujar MS Hidayat.

Kadin mengingatkan, masalah ketahanan pangan merupakan salah satu isu krusial yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan pemerintah untuk segera dibenahi. Untuk itu, kebijakan pemerintah perlu diperkuat dengan pembenihan pangan melalui penelitian dan pengembangan. Pemerintah diminta mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian.

Kadin juga aktif mengajak pelaku usaha agar fokus menggarap bisnis sektor pangan seperti beras, jagung, kedelai, dan *biofuel*. "Kami berharap pemerintah mendukung baik dari segi regulasi, kebijakan fiskal, dan kemudahan kredit," kata Noes Soediono, wakil ketua umum Kadin Indonesia bidang pangan dan agribisnis.

Dalam menghadapi krisis ekonomi global saat ini, menurut Sofjan, hanya ada dua opsi yang dapat dilakukan, yaitu menaikkan harga-harga barang dan benar-benar menguasai pasar dalam negeri. "Ironisnya, ketika akan menguasai pasar dalam negeri, birokrasi, dan pu-

ngutan-pungutan yang dibebankan kepada pengusaha juga sangat berat, seperti pajak PPN sebesar 10%," ungkap Sofjan.

Saat ini, pengusaha sudah tidak bisa menurunkan biaya produksi h banyak lagi karena kebijakan fiskal dan harga bahan bakar minyak (BBM) juga tidak jelas arahnya. "Kami harapkan pemerintah membantu kami, paling tidak di bidang infrastruktur," papar Sofjan.

#### Sangat Mencemaskan

Djajat Senior FAO Bidang Kolitas Bahan Pangan Pokok Mer-Cluff mengingatkan, Indonesia harus mewaspadai tren kenaikan harga pangan terkait dengan pertumbuhan populasi penduduk.

Pada 2007, harga komoditas pangan naik secara gila-gilaan. Harga terigu/gandum naik 90%, jagung maizena naik 70%, minyak kedelai 82%, susu bubuk 94%, dan beras 20%. "Kenaikan harga pangan akan terus berlangsung dan sangat mencemaskan, entah ini sampai kapan berlangsung," ujar Cluff.

Di sisi lain, stok pangan dunia menyusut. Per Akhir 2007, stok beras nasional 50% dibanding setahun sebelumnya, gandum berkurang 25%, serta stok biji-bijian anjlok 75%.

Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih dan pengamat pertanian HS Dillon berpendapat, kesalahan terbesar negara dunia ketiga adalah memasok bahan pangan mentah kepada perusahaan multinasional. Kelompok perusahaan multinasional itu lah yang mengolah bahan mentah menjadi produk pangan olahan bernilai tambah. Kemudian, mereka melipatgandakan harganya untuk dijual di pasar negara dunia ketiga.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Franky Welirang menambahkan, harga pangan tidak akan turun. Kalau pun turun, tidak akan kembali ke posisi sebelumnya. Harga gandum akan terus bertengger pada angka US\$ 600 per ton, meski sempat turun ke US\$ 500 per ton pada pertengahan Maret.

Franky menegaskan, solusi yang harus ditempuh bangsa Indonesia adalah memproduksi pangan sebanyak-banyaknya serta menempuh mendiversifikasi pangan. "Kadin harus memberi rekomendasi kepada pemerintah mengenai diversifikasi pangan," kata dia.

Menko Kesra Aburizal 'Ical' Bakrie memaparkan, pemerintah mendukung sektor pertanian lewat

skema penyediaan bibit unggul, penyediaan pupuk, mekanisasi, dan manajemen pascapanen guna memperbaiki produksi hasil pertanian. Pemerintah juga mengalokasikan sejumlah dana untuk sarana dan prasarana pertanian.

#### Kompetisi *Biofuel*

Dalam rakor pangan kali ini juga disoroti tentang konsumsi komoditas pangan untuk bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai biang keladi naiknya harga pangan dunia.

Namun, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Cakrawan menegaskan bahwa belum terjadi perebutan komoditas bahan pangan untuk kebutuhan *biofuel* (BBN) atau energi alternatif itu di Indonesia. "Konsumsi BBN di dalam negeri masih rendah," kata dia.

Bioetanol singkong yang dipakai di dalam negeri hanya 1.000 kilo liter per tahun atau 0,07% dari stok singkong. Biodiesel dari sawit Pertamina juga hanya mengonsumsi 16.000 liter per tahun atau 0,078% dari produksi sawit nasional.

Sebaliknya, sebanyak 70 calon investor *biofuel* yang telah mendaftarkan rencana investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum merealisasikannya. "Para investor itu menilai kebijakan pengembangan bahan bakar nabati di Indonesia belum memiliki kepastian," ujar Paulus.

Pengembangan BBN di dalam negeri terhambat bukan saja dari sisi industrinya, tapi juga pengembangan bahan baku, khususnya tanaman jarak karena terbentur pembebasan lahan. Dari 10 perusahaan BBN yang ada, tinggal empat perusahaan yang masih beroperasi.

CEO PT Sinar Mas Franky O Widjaja mengakui, harga jual minyak goreng di pasar dalam negeri Rp 9.000/kg sudah cukup memadai bagi konsumen maupun produsen. Dari segi pasokan minyak nabati, sebenarnya tidak ada masalah, bahkan terjadi kelebihan produksi. Sebab, produksi tahun ini diperkirakan sebanyak 22 juta ton sementara kebutuhan nasional hanya 4,5 juta ton, sehingga sisanya diekspor. (c117/118/hut/hg)